

Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan Tahun 2021

Abdul Haq

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200502110031@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pajak; penerimaan pajak;
pertumbuhan ekonomi,
lamongan; ekonomi

Keywords:

taxes; tax revenue;
economic growth;
lamongan; economic

ABSTRAK

penelitian ini bertujuan menentukan bagaimana penerimaan pajak berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil adalah 5, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana menggunakan program SPSS. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive dengan kriteria laporan realisasi anggaran Kabupaten Lamongan dari tahun 2017-2021. Menurut hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tidak terpengaruh secara signifikan oleh penerimaan pajak 2021.

ABSTRACT

In 2021, during the Covid-19 epidemic, this study seeks to ascertain the impact of tax revenue on economic growth in Lamongan Regency. This study used a quantitative methodology. Using the SPSS application, the simple linear regression data analysis technique is carried out. In Lamongan Regency, commencing in 2017 through 2021, the sample procedure is carried out using the purposive sampling approach with criteria. There were 5 samples collected. According to the findings, tax revenue in Lamongan Regency did not significantly affect economic growth in 2021.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses meningkatkan pendapatan dalam kurun waktu yang menjadi faktor penting untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara (Todaro, n.d.). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi ditingkat daerah adalah faktor yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam realita kegiatan perekonomian, pertumbuhan perekonomian memiliki indikator yaitu kemajuan dalam produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti peningkatan produksi, perkembangan infrastruktur, kemajuan fasilitas pendidikan, pertumbuhan sektor layanan, dan peningkatan produksi peralatan investasi (Sukirno, n.d.)

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu ataupun badan hukum, Sifatnya memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Sektor pajak memegang peran yang krusial bagi negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia karena menerapkan fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Fungsi anggaran berarti pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sedangkan fungsi regulasi berarti pajak berperan sebagai alat pengaturan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Wajib pajak yang harus dipatuhi adalah kerelaan membayar pajak, dimana kerelaan membayar pajak dapat diartikan sebagai nilai kontribusi seseorang dalam rangka membiayai seluruh kebutuhan umum negara tanpa mengharapkan timbal balik secara spontan (Murdiansyah & Wahyuni, 2020). Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan wajib pajak timbul dari adanya paksaan dan tanpa paksaan (Andriani, n.d.) dan dengan adanya Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan dikeluarkannya e-tax system yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing membuat wajib pajak lebih dimudahkan dalam patuh akan pajak (Lailiyah & Andriani, 2023)

Kabupaten yang terletak berada di utara provinsi Jawa Timur yaitu salah satunya Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan dijuluki sebagai barometer pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.782,05 km² dan 27 kecamatan. Per 30 Desember 2016, penjualan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamongan meningkat masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,15 persen. Kalaupun meningkat, angka tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan yang menjanjikan secara signifikan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: Apakah Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan Tahun 2021. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerimaan pajak di Kabupaten Lamongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Landasan Teori

Pajak

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan kompensasi langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2017)

Pajak pusat dan daerah adalah dua jenis pajak utama yang dikenakan oleh pemerintah negara. Ini termasuk pajak penghasilan, pajak nilai tambah, pajak nilai tambah barang mewah, materai, dan pajak bumi dan bangunan di perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Selain pajak pusat, ada juga pajak daerah. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja masing-masing daerah Mardiasmo (2018).

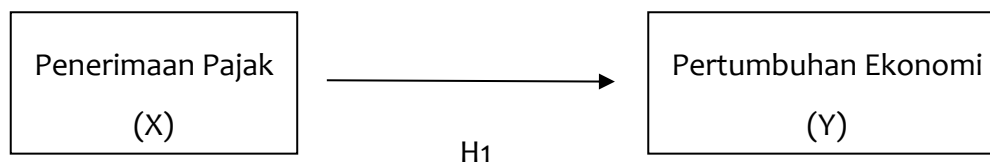
Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang memiliki dampak yang menguntungkan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin cepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, semakin tinggi penerimaan pajak yang dihasilkan. Beberapa studi sebelumnya juga mendapatkan hasil yang serupa. Sebagai contoh, penelitian oleh Ardani dan rekan-rekan (2009) menemukan penerimaan pajak dan belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu, dalam kerangka pengelompokan yang telah disajikan pada latar belakang penelitian di atas, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang termasuk dalam kelompok pertama, di mana tingkat penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Nirbitan & Sartika (2020), pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan masyarakat meningkat ketika produksi barang atau jasa meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur di tingkat nasional dengan PDB dan di tingkat daerah dengan PDB daerah. Menurut Statistics Finland, RGDP adalah total Nilai Tambah Bruto dari semua industri. perekonomian daerah. Nilai tambah adalah nilai hasil dari perpaduan antara faktor produksi dan bahan baku. Perhitungan nilai tambah dihasilkan dari besaran produk ternilai dikurangi biaya rata-rata. Nilai tambah bruto meliputi faktor pendapatan dan penyusutan dan pajak tidak langsung bersih. Artinya, jika dijumlahkan nilai tambah bruto setiap sektor dalam menjumlahkan nilai semua sektor, dapat menjadikan produk nasional bruto daerah.

Kerangka Konseptual



Terdapat Pengaruh Secara Signifikan Antara Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan

Penerimaan pajak adalah pendapatan utama bagi pemerintah daerah, pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan positif dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, seperti peningkatan produksi, investasi, dan lapangan kerja. Penerimaan Pajak yang tinggi bisa menyebabkan pertumbuhan sektor usaha yang mencerminkan perekonomian di Lamongan berkembang, karena memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembayaran pajak. Menurut penelitian oleh (Shilaho, 2020) memberikan hasil bahwa penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan melakukan penelitian ini mulai tahun 2021. Laporan keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Lamongan dari tahun 2017 hingga 2021 adalah subjek penelitian ini. Dalam penelitian ini, total sampling digunakan untuk mengambil sampel dari seluruh populasi. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

merupakan uji yang mana ada perbedaan dalam variasi antara residual satu dan pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85,204	13,999		6,086	,009
	Pertumbuhan Ekonomi	-,009	,062	-,088	-,154	,888

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Uji heteroskedastisitas menunjukkan koefisien hampir nol dengan nilai t-statistik (-0.154), dan nilai sig. (0.888) menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Dengan kata lain, kami tidak dapat memastikan bahwa model regresi mengalami variasi yang tidak konstan berdasarkan nilai-nilai ini.

Uji Multikolinieritas

Merupakan uji yang bertujuan menguji model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antar variabel bebas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,086	,009		
	Pertumbuhan Ekonomi	-,154	,888	1,000	1,000

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Semua item variabel atau indikator dalam penelitian ini memiliki toleransi kelimpahan 1,000 lebih dari 0,1 dan nilai statistik VIF 1,000 lebih dari 10. Hasil uji multikolineritas ditunjukkan pada tabel di atas. Karena tidak ada multikolineritas atau korelasi antara variabel bebas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk variabel tersebut layak.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk variable terdapat dalam table berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	5
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa semua item indikator dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 4. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	85,204	13,999	6,086	,009
	Pertumbuhan Ekonomi	-,009	,062	-,154	,888

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Koefisien regresi tidak mempengaruhi variabel dependen model dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0.888 dalam uji t. Hipotesis nol bahwa koefisien tersebut memiliki nilai nol tidak didukung oleh bukti yang cukup.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,270	1	20,270	,024	,888 ^b
	Residual	2571,627	3	857,209		
	Total	2591,897	4			

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023

Nilai F-statistik yang rendah (0.024) menunjukkan bahwa perbedaan antara model regresi dan model referensi tidak signifikan, dan nilai sig. tinggi (0.888) menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa model regresi memiliki signifikansi yang lebih besar secara keseluruhan.

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan

Hasil hipotesis pertama, diketahui variabel efektivitas penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan, dengan nilai signifikan sebesar 0,888 > nilai alpha sebesar 0,05. Artinya efektivitas penerimaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten lamongan sehingga hipotesis pertama diterima. Studi tahun 2018 oleh Arfah Habib Saragih menemukan bahwa variabel bebas penerimaan pajak daerah dan rasio gini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat level signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$), bahkan 99% ($\alpha = 1\%$). Namun, indeks harga konsumen (yang menunjukkan tingkat inflasi) tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penerimaan pajak ini seharusnya menjadi proyek yang produktif untuk membantu menumbuhkan dalam pertumbuhan ekonomi karena memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan sosial dan menciptakan lapangan kerja baru. Penerimaan pajak juga bisa digunakan untuk mendanai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat lebih efektif. Kesenambungan dalam kontribusi pihak bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, efektivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Penerimaan pajak ini seharusnya menjadi proyek produktif untuk membantu menumbuhkan dalam pertumbuhan ekonomi karena memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan sosial dan

menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terjadi juga dikarenakan pada tahun pandemi tersebut perekonomian masyarakat masih dalam tingkat yang rendah, sehingga pembayaran pajak pun ikut terganggu kepatuhannya. Oleh karena itu, diperlukan penambahan periode penelitian sehingga akan hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan. Keterbatasan lainya juga terdapat faktor laporan anggaran yang dijadikan variabel penelitian.

Daftar Pustaka

- Andriani, S. (n.d.). VOLUNTARY COMPLIANCE DENGAN KONSEP KEADILAN PAJAK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN BAGI WAJIB PAJAK.
- Anggaran, L. R. (2017). *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan 2017*.
- Anggaran, L. R. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan 2018*.
- Anggaran, L. R. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan 2019*.
- Anggaran, L. R. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan 2020*.
- Anggaran, L. R. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lamongan 2021*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2017).
- Komang, A. W., & Jati, I. K. (n.d.). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 2019, 28. 85-10.
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Murdiansyah, I., & Wahyuni, N. (2020). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang)*. 05.
- Safitri, I. (2021). *Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta*.
- Saraswati, I. A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi*. 24.
- Sukirno, S. (n.d.). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. 2011.
- Todaro, M. P. (n.d.). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. 2005, kedelapan. Erlangga.